

Judul : Konsultan Kecil Nggak Hitungan
Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tender Proyek Pemerintah Konsultan Kecil Nggak Hitungan

IKATAN Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) keluhkan kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak ke pengusaha lokal. Pengusaha kecil daerah sering dicuekin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Walhasil, banyak proyek konsultansi di daerah, pemenang proyeknya berasal dari Jakarta dan sekitarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras bisa memahami keluhan dari para pelaku jasa konstruksi terhadap kebijakan kemudahan berusaha saat ini. Salah satunya terkait penetapan Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) dan Nilai Proyek Terendah yang ditetapkan LKPP.

Realitas yang terjadi, nilai harga yang ditawarkan ini tidak lagi memperlihatkan kelayakan dan logika dalam menawar.

Karena itu, dia memastikan pihaknya akan berupaya memediasi agar dua hal tersebut bisa dinegosiasikan dengan lebih menitikberatkan kepada pemakaian domisili perusahaan.

"Memang di konstruksi ini jadi permasalahan utama (NPT dan Nilai Proyek Terendah), sehingga ini akan menjadi salah satu yang akan kami bahas bersama LKPP sebagai keberpihakan kita kepada konsultan lokal," kata Andi Iwan saat rapat kerja bersama Inkindo, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Terkait pengadaan jasa konsultansi oleh Pemerintah, sudah ada kebijakan dari Kementerian BUMN. Di dalam kebijakan tersebut, BUMN tidak lagi terlibat untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp 5 miliar. Namun kebijakan tersebut masih sebatas surat edaran.

"Tapi nanti kita akan coba beri masukan ke Kementerian PUPR agar bidang konsultansi itu anggaran di bawah Rp 5 miliar sebaiknya pengusaha swasta murni," tegasnya.

Politisi Gerindra Gajip Sulawesi Selatan ini mengatakan, sejatinya segala hal terkait regulasi kemudahan berusaha sudah dicetuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ke depan, tidak ada lagi pengusaha yang mengeluh bahwa untuk berusaha atau berinvestasi mengalami hambatan.

Walau segalanya mudah, tidak berarti para pelaku usaha di jasa konstruksi ini kemudian mengenyampingkan tentang mutu, kualitas dan sebagainya.

Makanya, dia mendorong para pelaku usaha untuk memiliki kemampuan mengupgrade atau meningkatkan profesionalismenya.

"Tapi itu harus diikuti juga oleh kemampuan Pemerintah, misalkan dalam penyediaan tenaga ahli," terangnya.

Andi Iwan menegaskan, saat ini memang negara masih sangat kekurangan tenaga ahli konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merilis, tenaga ahli yang sudah tersertifikasi saat ini jumlahnya kurang lebih 260 ribu orang. Sementara kebutuhan tenaga ahli di dalam negeri mencapai 800 ribu orang.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Inkindo Peter Frans menyampaikan keluhan dari konsultan-konsultan lokal yang sering kali kalah bersaing dengan konsultan dari Jakarta. Hal ini imbas dari kebijakan di LKPP terkait penetapan NPT.

"Ini yang menyebabkan teman-teman konsultan kecil kalah bersaing dengan konsultan besar," katanya.

NPT ini, sejatinya untuk memangkas dari *longlist* menjadi *shortlist*. Dia meminta agar tender lebih menekankan ke domisili perusahaan. Sebab, selama ini yang memiliki kemampuan NPT-nya hingga 100 persen itu adalah konsultan-konsultan besar yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. ■ KAL